

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET DALAM MEWUJUDKAN
EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET KECAMATAN
DI KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF LOCAL ASSETS MANAGEMENT POLICY
IMPLEMENTATION ON ASSET MANAGEMENT FOR CREATING DISTRICTS
INVENTORY EFFECTIVENESS IN GARUT REGION***

TESIS

***Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Pascasarjana Universitas Garut***

**Oleh :
AGUNG MARAN NESTAPA**

NPM. 24091115047



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GARUT**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

AGUNG MARAN NESTAPA

NIM 2409115047

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng

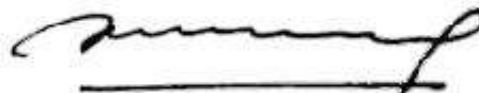
Pembimbing II



Dr. Wati Susilawati, M. Si

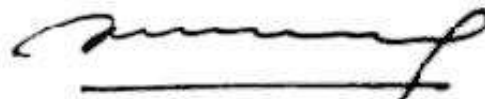
Mengetahui :

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut**



Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MSi

**Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut**



Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, Msi

ABSTRAK

PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT

AGUNG MARAN NESTAPA

NPM : 2409115047

PASCASARJANA UNIVERSITAS GARUT

Tesis, 2017, xvii, 5 bab, 164 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset Untuk Meningkatkan efektivitas inventarisasi aset kecamatan di Kabupaten Garut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan teknik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang yaitu Pengurus Barang di Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut, dengan tehnik sensus. Teknik pengumpulan data adalah teknik *field research* (penelitian lapangan) dan studi dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, yaitu variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berada pada kriteria **baik**, variabel Manajemen Aset berada pada kriteria **baik**, dan variabel efektivitas inventarisasi aset kecamatan menunjukkan kriteria **baik**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Manajemen aset dan efektivitas inventarisasi aset kecamatan di Kabupaten Garut. Hal ini diperlihatkan oleh nilai koefisien determinasi yang menunjukkan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap Manajemen aset kecamatan Untuk Meningkatkan efektivitas inventarisasi aset kecamatan di Kabupaten Garut. Sedangkan pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan adanya pengaruh.

Dari semua hipotesis yang diajukan hanya hipotesis variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap efektivitas inventarisasi aset kecamatan yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dan positif atau hipotesis (H_0) diterima, sedangkan untuk variabel yang lain hipotesis (H_0) ditolak dan mempunyai pengaruh yang signifikan.

Selain itu, terdapat permasalahan penting yang ditemukan dalam penelitian yaitu pada Variabel Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dimana sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini yang menyebabkan pengelolaan asset daerah menjadi belum tertib.

Kata kunci : implementasi kebijakan, manajemen aset, efektivitas

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL ASSETS MANAGEMENT POLICY IMPLEMENTATION FOR CREATING DISTRICTS INVENTORY EFFECTIVENESS IN GARUT REGION

AGUNG MARAN NESTAPA

NPM : 2409115047

PASCASARJANA UNIVERSITAS GARUT

Thesis, 2016, xvii,5 chapter, 164 page

The aim of this study was to obtain data that will be used to test and analyze the Influence of Local goods property Management Policy Implementation Toward Asset Management To Improve Effectivity Of Subdistrict Asset Inventory In District of Garut.

The method used in this study is the descriptive analysis with survey technique. The population in this study were as many as 42 people consist of Local goods care taker at district of Garut, with sensus techniques. The data collection technique used is the field research (field research) and study documentation . While technical analysis of the data used to answer the research hypothesis is a statistical analysis with path analysis model (path analysis).

The result of research in this study, variable of Local goods property Management Policy Implementation, Asset Management and Effectivity Of Subdistrict Asset Inventory showed good criterion. This is evidenced by the average of respondents' answers regarding these variables.

Based on the test results is known that the influence Local goods property Management Policy Implementation positively give affection to Asset Management significantly to Effectivity Of Subdistrict Asset Inventory. This is shown by the coefficient of determination that indicates to the influence Local goods property Management Policy Implementation toward Asset Management and Effectivity Of Subdistrict Asset Inventory. While testing the sub-hypothesis suggests that all variables showed the influence. Of all the hypotheses researched

the results showed only variable of Local goods property Management Policy Implementation to Effectivity Of Subdistrict Asset Inventory that the hypothesis (H_0) is accepted, it's mean there's no significant and positif effect. While that the other hypothesis (H_0) is rejected.

In addition, there are important problems found in this research, in Local goods property Management Policy Implementation variable where socialized had'nt been done consistently so that the policy implementation had not been optimally outcome, and local asset management did not well done.

Key word : policy implementation, Asset management, effectivity

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT”**. Usulan penelitian ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian seminar Usulan Penelitian pada program Pasca sarjana Universitas Garut Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan waktu yang penulis miliki. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Walaupun demikian, penulis berharap bahwa thesis ini tetap dapat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pasca sarjana (S2) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. H.Abdusy Syakur, M.Eng, selaku Rektor Universitas Garut.
2. Bapak Prof. Dr. Jusman Iskandar, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana FISIP
UNIGA
3. Bapak Dr.Ir. H.Abdusy Syakur, M.Eng. selaku Pembimbing I.

4. Ibu Dr. Wati Susilawati, M.Si, selaku Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana FISIP UNIGA.
6. Bapak/Ibu staf administrasi FISIP UNIGA.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati.
8. Keluarga yang selalu memberikan semangat
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah mereka berikan mendapat imbalan dan ridho Allah SWT. Aamiin

Garut, Mei 2017

Penulis,

Agung Maran Nestapa

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	X
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah Penelitian	3
Maksud dan Tujuan Penelitian	4
Kegunaan Peneitian	5
Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian	5
Metodologi Penelitian	11
Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	13
Kesimpulan dan Saran	25
Daftar Pustaka.....	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase.....	13
Tabel 2 Kriteria Penilaian kebijakan pengelolaan barang milik daerah	14
Tabel 3 Kriteria Penilaian manajemen aset	17
Tabel 4 Kriteria Penilaian efektivitas inventarisasi aset kecamatan	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Penelitian	10
Gambar 2 Paradigma Penelitian	12

Latar Belakang

Orde Reformasi yang terjadi di Indonesia menggantikan orde baru pada dasarnya merupakan perubahan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean Government*) dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara.

Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan bagian utama dalam reformasi keuangan di bidang keuangan daerah. Dengan demikian, terbitnya kedua undang-undang tersebut merupakan momentum penting dalam reformasi keuangan daerah. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk di dalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan pengolahan terhadap aset milik pemerintah daerah dengan cara melakukan langkah strategis melakukan optimalisasi aset milik pemerintah daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar.

Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya

melalui pengelolaan aset. Aset disini dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa sajakah yang harus dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam hal ini adalah aset tetap tanah dan bangunan.

Salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data aset. Ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.

Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah ini dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagai peraturan operasional dari peraturan pemerintah tersebut, Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, bahwa yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Dalam pengelolaan manajemen aset dibutuhkan sumber daya yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang cukup baik, hal ini dikarenakan jumlah aset yang cukup besar dan selalu bertambah tiap tahun. Sementara sumber daya manusia yang tersedia di SKPD Kecamatan sangat terbatas kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengelola aset yang cukup besar.

Mengingat aset di Kabupaten Garut yang cukup tinggi dan tersebar di 42 Kecamatan Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 611 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak lepas dari kendala yang dihadapi diantaranya karena Kabupaten Garut mempunyai wilayah yang sangat luas dan tersebar di 42 Kecamatan maka sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut menjadi terhambat, sehingga banyak pengelola aset yang tidak faham akan peraturan tersebut, padahal jumlah aset yang harus dikelola oleh SKPD Kecamatan terbilang cukup besar

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi pernyataan masalah (*problem statement*) penelitian sebagai berikut : “Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan yang belum optimal, hal ini diduga antara lain karena Manajemen Aset yang belum efektif dan Pelaksanaan

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak dilaksanakan sepenuhnya”

Sehubungan dengan pernyataan masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan masalah (*problem question*) utama penelitian ini adalah : “Adakah Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset dalam mewujudkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut?”

Pertanyaan masalah utama tersebut, selanjutnya diformulasikan dalam sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Adakah Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset?
2. Adakah Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut?
3. Adakah pengaruh manajemen aset terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghimpun data dan informasi mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset dalam mewujudkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan keuangan daerah terhadap manajemen aset dalam meningkatkan efektivitas inventarisasi aset kecamatan di Kabupaten Garut.

Kegunaan/ Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan/Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya dan mengembangkan kajian keilmuan administrasi negara, serta dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah untuk kepentingan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Garut sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan kebijakan aset terhadap fungsi manajemen keuangan kecamatan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di kecamatan dimasa yang akan datang.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Administrasi negara (*public administration*) yang dikenal di Indonesia adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Bentuk kerjasama semua pihak dalam rangka mencapai tujuan negara adalah merupakan kajian dari administrasi negara. Sebagaimana dikemukakan Waldo (dalam Iskandar, 2013:18) yang memberikan definisi administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu White (dalam Iskandar, 2013:176) mengemukakan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik.

Dilihat dari ilmu, menurut Dimock and dimock (dalam Iskandar, 2013 : 17) Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik, yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Diartikan juga sebagai suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak saja

mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya.

Dalam fungsi kegiatannya, Fayol (dalam Iskandar, 2012 : 24) memisahkan fungsi administrasi ke dalam 5 (lima) aspek pokok yang penting, yaitu : 1) merencanakan; 2) mengorganisasi; 3) memimpin; 4) melaksanakan pengkoordinasian; dan 5) melaksanakan pengawasan. Menurut Lepawsky (dalam Iskandar, 2012 : 24), administrasi kadang-kadang menunjuk pada kata-kata khusus, baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen administratif atau organisasi administratif. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau manajemen, terdapat fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah

Austin (dalam Wahab 2014 : 62) mendeskripsikan pendekatan kebijakan profesional sebagai studi kebijakan publik yang berupaya menerapkan ilmu sains sebagai solusi masalah di lapangan. Analisis ini meyakini bahwa studi kebijakan itu pada akhirnya akan mengembangkan "Ilmu Kebijakan" yang mampu memberi informasi kepada para pembuat keputusan kebijakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan dan mendiagnosis masalah kebijakan secara efektif,
- b. Menyarankan alternatif kebijakan,
- c. Mengembangkan model yang bisa membantu meraih tujuan yang diinginkan dan metode pengujian model tersebut,
- d. Menetapkan tujuan jangka pendek, dan

- e. Memperkirakan kelayakan berbagai program kebijakan.

Dubnick dan Barder (dalam Wahab 2014 : 63) juga menjelaskan dua kategori analisis kebijakan lain, yaitu analisis kebijakan administratif dan personal. Analisis administratif terutama bertujuan membantu tercapainya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, serta cenderung mengadopsi metode dan tujuan yang sama dari analisis kebijakan profesional.

Edwards III (dalam Agustino, 2010 : 149-154) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mendukung, meliputi: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi atau sikap, dan d) struktur birokrasi.

Sementara Meter dan Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi yaitu :

1. Sumber-sumber kebijakan
2. Komunikasi antar organisasi
3. Karakteristik instansi pelaksana
4. Kecenderungan tanggung jawab pelaksana kegiatan

Manajemen Aset

Menurut Skinner & Ivancevich (dalam Anoraga, 2011 : 110) manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.

Menurut Skinner & Ivancevich (dalam Anoraga, 2011 : 110) manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran.

Untuk mengukur manajemen aset penulis mengambil teori yang dikemukakan oleh Mahumudi (2010:157) sebagai berikut :

1. Pengadaan Aset Tetap, meliputi indikator 1). Prinsip Efisiensi dengan

- 2). Prinsip Efektivitas
2. Prinsip Pembelian, meliputi indikator 1) Kualitas, 2) Kuantitas.
3. Proses Pencatatan / Administrasi, indikatornya 1) Pencatatan Akuntansi, 2) Pencatatan Penyusutan Aset.
4. Proses Penghapusan, meliputi dua indikator 1) Mekanisme Penghapusan 2) Mekanisme Pemindahtanganan.

Efektivitas Inventarisasi Aset

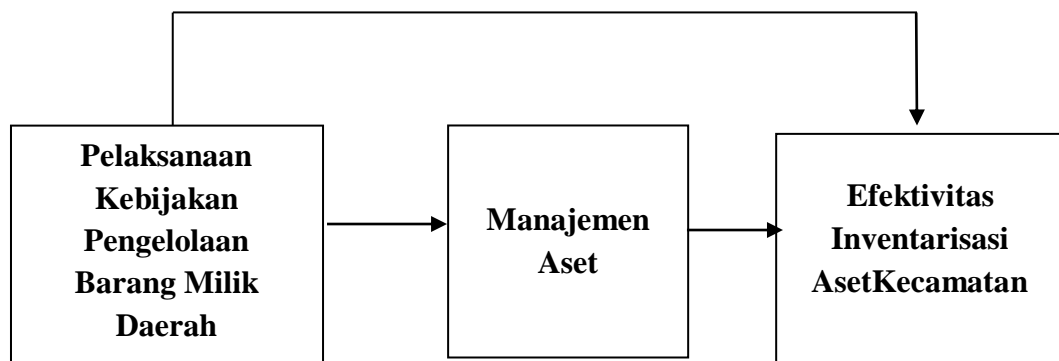
Efektivitas inventarisasi aset kecamatan mengacu apa yang dikemukakan Indrawidjaya (dalam Iskandar 2013:339) memberikan kriteria suatu kegiatan dapat dikatakan mencapai efektifitas apabila:

- a. Keterbukaan kebijakan dasar, tujuan dan rencana diketahui secara terbuka oleh seluruh pihak.
- b. Kejelasan Strategi kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Pengorganisasian sumber daya organisasi yang jelas.
- d. Dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan perencanaan disertai pengorganisasi dan pengawasan.
- e. Hasilnya dapat mencapai tujuan dan mendatangkan keuntungan atau kepuasan masyarakat.

Dalam menunjang efektifitas inventarisasi asset di Kecamatan terdapat tiga dimensi dan indikator sebagaimana dikemukakan oleh (Sumini dan Octavia Ester Pangaribuan 2010) diantaranya :

1. Proses Penggunaan barang daerah meliputi indikator 1) Penetapan status penggunaan barang daerah, 2) Penginventarisasian barang daerah.
2. Pemanfaatan barang daerah meliputi indikator 1) mekanisme pemanfaatan, 2) Menetapkan sasaran pemanfaatan barang daerah dan 3) Pendayagunaan barang daerah.
3. Pengamanan dan Akuntabilitas barang daerah meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan legalitas. 1) Pengamanan fisik meliputi indikator labelisasi dan kodifikasi barang daerah, 2) pengamanan administratif meliputi indikator pencatatan, pembukuan

Berdasarkan kerangka pemikiran dan anggapan dasar tersebut, peneliti merumuskan model penelitian sebagaimana gambar berikut ini :



Gambar 1
Model Penelitian

Hipotesis

- a. Hipotesis Utama

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset dalam upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset dalam upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut.

Hipotesis utama tersebut, selanjutnya dirinci ke dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset

2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut.

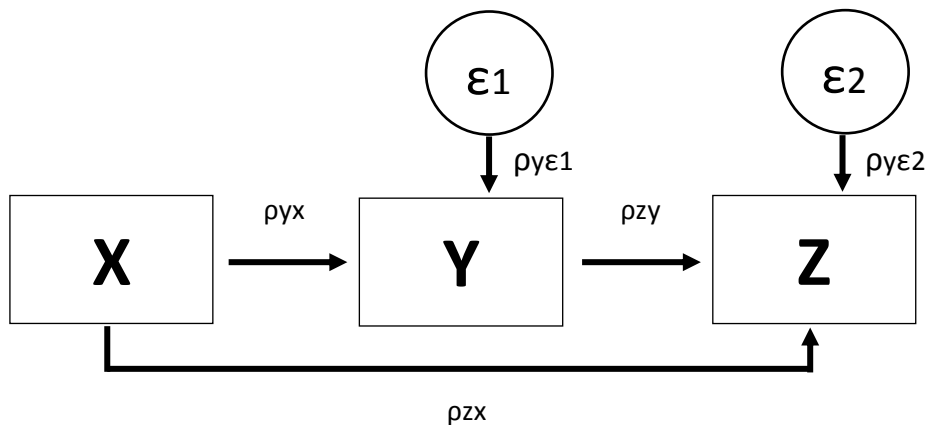
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh manajemen aset dalam upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah terhadap manajemen aset dalam upaya meningkatkan efektivitas inventarisasi aset Kecamatan di Kabupaten Garut.

Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif-analisis* dengan teknik survey. Iskandar (2014:174) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungannya antara dua atau lebih fenomena

Paradigma penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel tersebut di atas yang merupakan model *causal effectual*, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2
Paradigma penelitian

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner berupa daftar pernyataan yang ditujukan kepada Pengurus Barang di Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Alat ukur ini disusun secara terstruktur,

yang memuat beberapa item pernyataan berikut alternatif jawaban. Pengukuran kuisisioner penelitian ini menggunakan model *skala perbedaan semantik*. Kuisisioner yang digunakan adalah skoring yaitu pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan penelitian. Responden diminta untuk memilih lima alternatif jawaban yang masing-masing diberi skor: 1, 2, 3, 4, dan 5.

Peneliti melakukan uji validitas lapangan dengan pengumpulan data terhadap 42 reponden melalui alat ukur tersebut. Skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dari Person (dalam Iskandar, 2015: lampiran, 4:28). Selanjutnya, untuk menguji reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, menggunakan rumus statistik, yaitu rumus *Alpa Cronbach*.

Sehubungan dengan pendekatan analisis yang digunakan, maka untuk keperluan analisis penulisan hipotesis data yang berskala ordinal, terlebih dahulu di transformasikan menjadi data berskala interval melalui metode suksesif (*Method of Successive interval*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik dengan model analisis jalur (*Path Analysis*),

Penelitian ini berlangsung selama 09 bulan mulai dari Bulan Agustus 2016 sampai dengan Bulan Mei 2017.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Untuk mengetahui kondisi variabel pelaksanaan kebijakan, kinerja dan Efektivitas pemeliharaan maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner/angket yang terdiri dari pertanyaan/pernyataan yang masing-masing disertai 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai

menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1

Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

No	Persentase	Kriteria Penilaian
1	20% -35,99%	Sangat Kurang Baik
2	36% -51,99%	Kurang Baik
3	52% -67,99%	Cukup Baik
4	68% -83,99%	Baik
5	84% -100%	Sangat Baik

Deskripsi Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mengetahui kondisi Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 25 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 20 pertanyaan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Penyampaian Kebijakan pengelolaan	138	65,71%	Cukup

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	barang milik daerah sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan itu			
2	Penyampaian kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah disertai petunjuk – petunjuk yang jelas	141	67,14%	Cukup
3	Penyampaian Kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah disampaikan secara benar dan tepat .	161	76,67%	Baik
4	Kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah disosialisasikan dengan konsisten	110	52,38%	Cukup
5	Sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut sudah sesuai dan tepat sasaran	111	52,86%	Cukup
6	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut telah Disosialisasikan sesuai dengan arah sasaran kebijakan yang ingin dicapai	168	80,00%	Baik
7	Kuantitas SDM yang ada sudah memadai terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut	163	77,62%	Baik
8	Kualitas SDM yang ada telah memadai terhadap pelaksanaan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Garut	158	75,24%	Baik
9	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Permendagri 17 tahun 2007 telah didukung oleh sejumlah fasilitas yang memadai.	147	70,00%	Baik
10	Fasilitas Peralatan kerja secara kualitas yang disediakan telah mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	159	75,71%	Baik
11	Fasilitas yang ada telah digunakan secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang	157	74,76%	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	mengacu pada Permendagri 17 tahun 2007			
12	Para pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempunyai kesepakatan dan komitmen bersama yang kuat untuk melaksanakan kebijakan secara optimal	150	71,43%	Baik
13	Para pelaksana Kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempunyai sikap dan perilaku yang konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan itu	133	63,33%	Cukup
14	Para pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah menerima dengan baik terhadap dikeluarkannya kebijakan itu	141	67,14%	Cukup
15	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah didukung dengan kemampuan sumber daya yang kompeten	171	81,43%	Baik
16	Pelaksana Kebijakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan itu dengan sebaik-baiknya	174	82,86%	Baik
17	Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur yang baik	174	82,86%	Baik
18	Pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	174	82,86%	Baik
19	Pelaksana Kebijakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempertanggungjawabkannya pelaksanaan tugasnya dengan benar	174	82,86%	Baik
20	Pelaksana Kebijakan kebijakan	165	78,57%	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	pengelolaan barang milik daerah sudah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara baik			
JUMLAH			1461,43%	Baik
RATA-RATA			73,07%	

Sumber : Hasil Penelitian 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah **baik** yaitu sebesar 73,07% .

Dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada beberapa item yaitu item "*Pelaksana Kebijakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan itu dengan sebaik-baiknya*", item "*Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur yang baik* ", item "*Pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan*" dan item "*Pelaksana Kebijakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempertanggungjawabkannya pelaksanaan tugasnya dengan benar*", yaitu sebesar 82,86%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item "*Kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah disosialisasikan dengan konsisten*", sebesar 52,38%.

Deskripsi Variabel Manajemen Aset

Untuk mengetahui kondisi variabel Manajemen Aset, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 20 pertanyaan yang

masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Hasil pengolahan data terhadap 20 pertanyaan tentang Manajemen Aset adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Penilaian Manajemen Aset

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pengadaan aset tetap sudah direncanakan biayanya sesuai dengan kebutuhan	142	67,62%	Cukup
2	Masing-masing SKPD dapat menyesuaikan biaya yang ada dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan pengadaan aset tetap yang ada.	158	75,24%	Baik
3	Kegiatan pengadaan aset tetap telah dilaksanakan biaya yang efisien sesuai dengan kebutuhan	141	67,14%	Cukup
4	Kegiatan pengadaan aset di SKPD telah efektif sesuai kebutuhan yang direncanakan	131	62,38%	Cukup
5	Efektivitas sangat berperan penting dalam pengadaan aset agar kebutuhan yang telah direncanakan dapat digunakan dengan baik.	141	67,14%	Cukup
6	Dalam kegiatan pembelian aset /barang sudah disesuaikan dengan standar kualitas barang	163	77,62%	Baik
7	Masing-masing SKPD dalam hal kegiatan pembelian aset/barang , sudah mempunyai standar harga aset/barang	174	82,86%	Baik
8	Dalam kegiatan pembelian aset/barang sudah disesuaikan dengan jumlah standar sarana prasarana yang dibutuhkan.	181	86,19%	Sangat Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
9	Dalam kegiatan pembelian barang dengan yang dipesan telah sesuai dengan standar sarana prasarana	178	84,76%	Sangat Baik
10	Dalam kegiatan pembelian aset/barang proses dokumen kontraknya telah dilaksanakan sesuai dengan standar harga pemerintah	160	76,19%	Baik
11	Kegiatan Pembelian aset /barang yang langsung (LS) proses dokumen transaksinya telah ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku	175	83,33%	Baik
12	Pengurus barang telah melaksanakan kegiatan regulasi penyusutan aset sesuai peraturan yang berlaku	172	81,90%	Baik
13	Pengurus barang telah mencatat barang yang akan dihapus dalam pencatatan akuntansi untuk bahan neraca	149	70,95%	Baik
14	Pengurus barang telah melaksanakan pencatatan asetnya yang akan dihibah kedalam pencatatan akuntansi	137	65,24%	Cukup
15	Kegiatan pembelian belanja barang baik belanja jasa maupun belanja modal tetap dicatat dalam pencatatan akuntansi	133	63,33%	Cukup
16	Penilaian aset barang yang sudah rusak berat telah dicatat dalam pencatatan penyusutan aset	156	74,29%	Baik
17	Kegiatan penghapusan aset/barang selalu ditempuh tata cara penghapusannya supaya tertib.	139	66,19%	Cukup
18	Aset atau barang yang tidak memiliki nilai ekonomis telah dilaksanakan penghapusan asetnya	164	78,10%	Baik
19	Pengurus barang telah melaksanakan tata cara pemindahtanganan sebagai acuan dalam melaksanakan penghapusan aset .	179	85,24%	Sangat Baik
20	Pengurus barang telah melaksanakan berita acara hibah sebagai dasar pemindahtanganan penggunaan barang	179	85,24%	Sangat Baik
	JUMLAH		1500,95%	Baik
	RATA-RATA		75,05%	

Sumber : Hasil Penelitian 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Manajemen Aset adalah **baik** yaitu sebesar 75,05%.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “*Dalam kegiatan pembelian aset/ barang sudah disesuaikan dengan jumlah standar sarana prasarana yang dibutuhkan*“, sebesar 86,19%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item *Kegiatan pengadaan aset di SKPD telah efektif sesuai kebutuhan yang direncanakan*” sebesar 62,38%

Deskripsi Variabel Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan

Untuk mengetahui kondisi variabel Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 20 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 20 pertanyaan tentang Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Kriteria Penilaian Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Presentase Pengurus barang yang sudah menetapkan status penggunaan barang dengan baik berdasarkan dengan peraturan.	141	67,14%	Baik
2	Presentase Aset / barang pemerintah kabupaten Garut yang dapat didayagunakan dengan baik berdasarkan dengan ketentuan.	170	80,95%	Baik
3	Presentase Pengurus Barang yang sudah menginvetarisir aset/ barang dengan baik berdasarkan dengan ketentuan.	163	77,62%	Baik
4	Presentase Aset / barang pemerintah	159	75,71%	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	kabupaten Garut yang sudah diinventarisir dengan baik			
5	Presentase Aset / barang pemerintah kabupaten Garut semuanya sudah melaksanakan mekanisme pemanfaatan dengan baik	157	74,76%	Baik
6	Presentase Aset / barang pemerintah kabupaten Garut semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik	155	73,81%	Baik
7	Presentase Para pengurus barang yang mengetahui, mekanisme pemanfaatan barang daerah	172	81,90%	Baik
8	Presentase pengurus barang ,yang sudah mencatat barang dan disesuaikan dalam pencatatan dengan fisik barangnya	166	79,05%	Baik
9	Presentase Aset/barang yang sudah didayagunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah	171	81,43%	Baik
10	Presentase sudah melaksanakan penginventarisiran Aset/barang pemerintah kabupaten Garut yang dapat didayagunakan dengan baik	183	77,62%	Baik
11	Presentase para pengurus barang SKPD yang sudah melaksanakan labelisasi pada barang inventarisnya	163	77,62%	Baik
12	Presentase para pengurus barang SKPD yang sudah melaksanakan kodefikasi pada barang inventarisnya	154	73,33%	Baik
13	Presentase para pengurus barang SKPD yang sudah mencatat barang inventaris ke dalam kartu inventaris ruangan	145	69,05%	Baik
14	Presentase para pengurus barang yang sudah memahami pencatatan dan pembukuan barang milik daerah	155	73,81%	Baik
15	Presentase para pengurus barang yang melaksanakan pencatatan dan pembukuannya sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2007	153	72,86%	Baik
16	Presentase para pengurus barang yang melaksanakan pencatatan barang inventaris pada kartu barang	162	77,14%	Baik
17	Presentase Para pengurus barang yang tepat waktu melaporkan penggunaan barang yang dikelolanya	175	83,33%	Baik
18	Presentase Para pengurus barang yang telah	176	83,81%	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
	melaksanakan sensus barang daerah .			
19	Presentase Para pengurus barang yang telah memahami tahapan-tahapan penetapan status penggunaan barang yang dikelolanya	178	84,76%	Sangat Baik
20	Presentase para pengurus barang yang telah melaporkan penggunaan aset/barang yang dikelolanya formatnya sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2007 .	164	78,10%	Baik
	JUMLAH		1553,33%	Baik
	RATA-RATA		77,67%	

Sumber : Hasil Penelitian 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan adalah **baik** yaitu sebesar 77,67%.

dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “*Presentase Para pengurus barang yang telah memahami tahapan-tahapan penetapan status penggunaan barang yang dikelolanya*” sebesar 84,76%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item “*Presentase Pengurus barang yang sudah menetapkan status penggunaan barang dengan baik berdasarkan dengan peraturan*” sebesar 67,14%.

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hasil Pengujian Hipotesis Utama

Rumusan hipotesis utama yang diajukan adalah : “*terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset untuk meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu

dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7168

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset untuk meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} .

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{hitung} = 13,3831 > F_{tabel} = 3,2448$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Manajemen Aset dan variabel Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan.

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = **0,5138**. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Manajemen Aset dan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan sebesar 51,38%, sedangkan sisanya sebesar 48,62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (X) terhadap Manajemen Aset (Y)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: *“terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan

pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar **0,8533**.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 7,1393 > t_{tabel} = 2,024$.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Manajemen Aset. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Barang Milik Daerah adalah sebesar 56,03% sedangkan sisanya sebesar 43,97% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tidak dimasukkan kedalam model.

Pengaruh Manajemen Aset (Y) terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah : *“terdapat pengaruh Manajemen Aset terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan”*. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zy}) sebesar 0,6012.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Manajemen Aset terhadap Efektivitas inventarisasi asset kecamatan, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} Berdasarkan pengujian

diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = 5,3529 > t_{tabel} = 2,024$.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Manajemen aset berpengaruh terhadap variabel Efektivitas inventarisasi aset kecamatan.

Besar pengaruh variabel Manajemen aset terhadap variabel Efektivitas inventarisasi aset kecamatan secara langsung adalah sebesar 51,38% sedangkan sisanya sebesar 48,62% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Manajemen Manajemen aset yang tidak dimasukkan kedalam model.

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (X) terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: “terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas inventarisasi aset kecamatan”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0,0395.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Efektivitas inventarisasi aset kecamatan, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} = -1,1646 < t_{tabel} = 2,024$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas inventarisasi aset kecamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Manajemen Aset Dalam meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, variabel Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi struktur birokrasi yaitu mengenai *“Pelaksana kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.* Persentase terendah terdapat pada dimensi Sikap Aparatur yaitu mengenai *Para pelaksana Kebijakan pengelolaan barang milik daerah telah mempunyai sikap dan perilaku yang konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan itu*

Kedua, variabel Manajemen Aset menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada Prinsip Pembelian Aset yaitu *Dalam kegiatan pembelian aset/barang sudah disesuaikan dengan jumlah standar sarana prasarana yang dibutuhkan.* Persentase terendah terdapat pada dimensi Pengadaan Aset Tetap yaitu *Kegiatan pengadaan aset di SKPD telah efektif sesuai kebutuhan yang direncanakan*

Ketiga, variabel Efektivitas Inventarisasi aset Kecamatan menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Pengamanan dan Akuntabilitas Barang Milik Daerah yaitu *Presentase Para pengurus barang yang telah memahami tahapan-tahapan penetapan status penggunaan barang yang dikelolanya*. Persentase terendah terdapat pada dimensi Proses penggunaan Barang Milik Daerah yaitu *Presentase Pengurus barang yang sudah menetapkan status penggunaan barang dengan baik berdasarkan dengan peraturan*.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa secara simultan variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Manajemen Aset untuk meningkatkan Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut. Pengelolaan barang milik daerah dapat diimplementasikan secara optimal apabila telah terjalin komunikasi dan sosialisasi yang baik antara Pembuat kebijakan dan pelaksana pengelola aset (Pengurus Barang) dan pengguna aset. Sedangkan pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan adanya pengaruh.

Hasil pengujian sub hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Manajemen Aset, tetapi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di Kabupaten Garut, sedangkan Manajemen Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan di

Kabupaten Garut. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus ditunjang dengan manajemen yang baik sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Kemudian terdapat permasalahan penting yang ditemukan dalam penelitian, pada variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dalam dimensi komunikasi yaitu "*Kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah disosialisasikan dengan konsisten*" hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kondisi geografis di Kabupaten Garut dan jarak antar Kecamatan yang cukup jauh menjadi masalah tersendiri bagi SKPD terkait untuk melakukan sosialisasi secara konsisten,

Pada variabel Manajemen Aset terdapat kelemahan dalam dimensi Pengadaan Aset Tetap yaitu "*Kegiatan pengadaan aset di SKPD telah efektif sesuai kebutuhan yang direncanakan*". Pengadaan barang/ Aset Pemerintah Kecamatan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya: 1) adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah sehingga kebutuhan barang disesuaikan dengan anggaran yang ada, 2) keadaan geografis antara kecamatan yang berbeda menyebabkan pemberian anggaran pun harus diklasifikasikan sesuai dengan wilayah untuk pengadaan asetnya, dan 3) adanya pembelian barang yang sudah di plot oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan barangnya, sehingga ada aset yang tidak terpakai dan tidak efektif.

Pada variabel efektivitas inventarisasi aset kecamatan terdapat temuan penting pada dimensi proses penggunaan barang milik daerah yaitu "*Presentase Pengurus barang yang sudah menetapkan status penggunaan barang dengan baik*

berdasarkan dengan peraturan” ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan barang milik daerah belum memahami dengan baik tentang peraturan yang berlaku, tentunya hal ini berkaitan erat dengan sosialisasi tentang peraturan yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Pertama, variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal, terkait dengan peran dan fungsi unit organisasi dalam menjalankan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka disarankan agar Pimpinan di SKPD Kecamatan Kabupaten Garut melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi pegawai caranya para pengurus barang diikutsertakan dengan bintek dan diklat tentang pengelolaan barang milik daerah dan melakukan koordinasi secara intensif dan lebih efektif baik dengan instansi pemerintah terkait maupun lembaga non pemerintah melalui peningkatan kualitas koordinasi, komunikasi dan sosialisasi kebijakan secara lebih intensif dan efektif. Disamping itu, sosialisasi kebijakan secara komprehensif terhadap seluruh komponen, baik terhadap pengelola barang, pengguna barang, pengurus barang penting dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Secara operasional, langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

1. Melaksanakan analisis peran pengurus barang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengurus barang dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. Melaksanakan penetapan indikator-indikator capaian tujuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja maupun kompetensi pegawai selaku aparatur pengelola barang, serta;
4. Melakukan kegiatan koordinasi dengan pengguna barangterkait secara lebih baik dan intensif.

Kedua, variabel manajemen Aset yaitu terkait dengan kegiatan Proses Pengadaan sampai kepada Pencatatan / Inventarisasi, maka disarankan agar pengurus barang hendaknya melakukan analisis terhadap kebutuhan barang dan pencatatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh manajemen barang milik daerah. Hendaknya para pengurus barang harus memegang teguh pada asas-asas manajemen adalah:

1. Azas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas Transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat alam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Ketiga, variabel efektivitas Inventarisasi Aset Kecamatan yaitu dalam proses penggunaan barang milik daerah belum efektif, penggunaan barang bergerak di SKPD masih mengalami hambatan karena status penggunaan belum dilaksanakan banyak barang atau aset yang tidak diketahui keberadaannya belum tercatat dalam buku inventaris, sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tidak optimal sehubungan dengan itu peneliti menyarankan hal-hal berikut :

1. Pengurus barang harus segera menerapkan prinsip-prinsip manajemen barang milik daerah dengan baik dan tertib sehingga dapat mewujudkan efektivitas penggunaan barang milik daerah sebagai bahan penunjang terhadap pelaporan barang daerah dan penyusunan neraca keuangan daerah;

2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi para pengguna barang dengan pengurus barang diantaranya bertujuan untuk menertibkan barang milik daerah;
3. Memfasilitasi para pengurus barang dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lancar;
4. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, pengurus barang diharapkan berperan aktif untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti program pelatihan dan diklat pengelolaan barang milik daerah untuk menambah pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola barang supaya aman dan tertib ;

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan pada masa yang akan datang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut masalah-masalah diluar variabel-variabel yang telah dikaji dan diteliti dalam penelitian ini diantaranya masalah SDM pengurus barang, kompetensi pegawai dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU BUKU TESIS

- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, B. 2010. **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya**. Kencana, Jakarta.
- Dajan, Anto. 2009. **Pengantar Metode Statistik**, LP3ES, Jakarta. Press, Yogyakarta
- Gibson, et. All. 2000. **Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses**, Edisi delapan, Jilid II, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2011 **Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen**. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, Hani T. 2011. **Manajemen**. Edisi 2. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.**
- Ibrahim, Amin. 2010. **Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya**. Refika Aditama, Bandung.
- Iskandar, Jusman. 2013/a. **Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi**. Edisi Keempat, Puspaga, Bandung.
- _____. 2013/b. **Manajemen Publik**. Puspaga, Bandung.
- _____. 2013/c. **Teori dan Isu Pembangunan**. Puspaga, Bandung..
- _____. 2013/d **Dinamika Kelompok Organisasi dan Komunikasi Sosial**. Puspaga, Bandung.
- _____. 2013/e. **Teori Administrasi**. Puspaga, Bandung.
- _____. 2012/a. **Metode Penelitian Administrasi**. Puspaga, Bandung.

_____. 2012/b. **Kapita Selekta Teori Administrasi Negara.** Puspaga, Bandung.

Islamy, Irfan. 2010, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.** Bina Aksara, Jakarta

Hidayat, Muchtar. 2012, **Manajemen Aset (Privat dan Publik).** Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2010. **Kebijakan Publik.** PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
Rochmansyah, Heru dan Chabib Saleh. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. **Fokusmedia. Yogyakarta**

Siregar, Doli. D. 2010. Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. **PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.**

Sugiama, 2013. **Manajemen Aset Pariwisata,** Guardaya Intimarta, Bandung
 Susanto, 2013. **Sistem Informasi Manajemen,** Lingga Jaya: Bandung

Supranto, 2013. Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis Ed.3, Mitra Wacana: Jakarta.

Sutopo, 2000. **Kebijaksanaan Publik dan Implementasi,** LAN, Jakarta.

Thoha, Miftah. 2003. **Birokrasi dan Politik di Indonesia,** Raja Grafindo Persada. Jakarta

Waskito. 2010. **Kamus Praktis Bahasa Indonesia.** Wahyu Media, Jakarta.

Winardi, DR. S.E. 2012. **Asas-asas Manajemen.** PT. Alumni, Bandung.

Wibowo, Prof.Dr.SE.M Phil. 2009. **Manajemen Kinerja.** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Winarno, Budi, 2012, **Kebijakan Publik Teori dan Proses,** Med Press, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2010. **Analisa Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara**. Bina Aksara Jakarta

II. DOKUMEN-DOKUMEN

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Garut Nomor 611 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pola A Kabupaten Garut.

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2013